

Galian C di Bugbugan Sari Rusak Lingkungan

BARU-BARU ini tim Yustisi Pemkab Tabanan melakukan penutupan terhadap galian C yang berlokasi di Bugbugan Sari Desa Senganan, Penebel. Penutupan galian yang sudah lama beroperasi ini dianggap telah melanggar aturan yang ada, merusak lingkungan serta berbahaya bagi pekerja. Penutupan ini berawal dari laporan warga yang sudah mulai gerah dengan aktivitas galian C di tanah berbatu di kawasan tersebut. Warga kemudian menyampaikan keluhan secara resmi dengan bersurat ke Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Tabanan guna menertibkan galian C di kawasan dingin tersebut.

Menurut warga Banjar Bugbugan Sari, galian C di kampung tersebut mencapai delapan titik dan beroperasi kurang lebih sejak dua tahun lalu. Dikhawatirkan, dengan aktivitas galian C tersebut akan menimbulkan bencana di masa depan. Pasalnya, pengerukan tanah untuk mengambil batunya menyebabkan hutan bambu di lokasi tersebut terancam

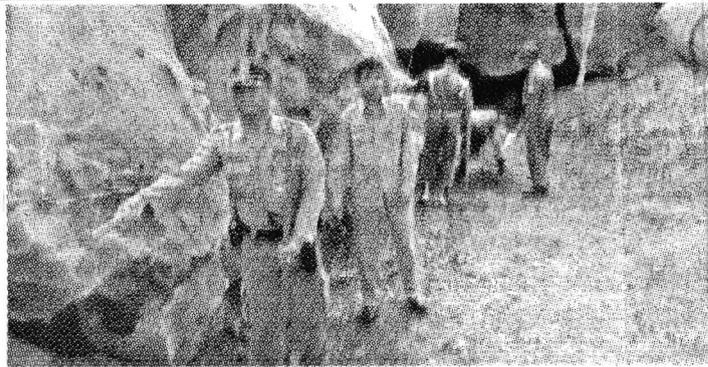
punah. Sehingga berdampak mengeringnya mata air. Lebih parah lagi, jika mata air Danau Tamblingan di Buleleng masuk ke hilir karena tanahnya amblas akibat dikeruk. Ditambah lagi truk yang keluar masuk galian C juga menyebabkan jalan cepat rusak.

Setelah dilakukan kajian oleh KLH dan terbukti telah melanggar undang-undang lingkungan hidup, proyek galian C di Banjar Bugbugan Sari Desa Senganan, Penebel akhirnya ditutup Tim Yustisi Pemkab Tabanan, Selasa (27/5) lalu. Penutupan proyek galian C yang diduga bodong ini juga terkait instruksi Bupati Tabanan yang memerintahkan untuk segera dilakukan tindakan tegas. "Ada instruksi Bupati untuk segera menyetop proyek galian C yang dinilai cukup berdampak negatif nantinya," tegas Kasatpol PP Tabanan Wayan Sarba. Sayangnya saat dilakukan penutupan proyek, tak satu pun ditemukan pekerja yang kerap melakukan penambangan di daerah tersebut. Hanya ada mesin ekskavator dan sejumlah

alat-alat manual di tempat tersebut.

Mantan Kabag Humas Tabanan ini menjelaskan, proyek galian C ini telah berlangsung secara sporadis sejak lama dan akhirnya ditutup setelah keluar hasil kajian yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup (BLH) yang kemudian disampaikan langsung kepada Bupati Tabanan. Dalam kajian tersebut berisi bahwa proyek galian C di Banjar Bugbugan Sari Penebel melanggar undang-undang lingkungan hidup dan melanggar perda. Pasalnya, daerah itu bukan untuk kegiatan penambangan karena merupakan daerah resapan. "Sayangnya selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk kegiatan penambangan batu. Padahal itu sangat berbahaya sekali," katanya.

Setelah adanya hasil kajian dan dikuatkan oleh instruksi pimpinan agar segera melakukan penutupan terhadap proyek tersebut, pihaknya pun tak mau menunggu lama lagi. Setidaknya ada lima titik yang dipasang police line



BPM/kmb24

DITUTUP - Tim Yustisi Pemkab Tabanan saat menutup galian C di Bugbugan Sari Penebel.

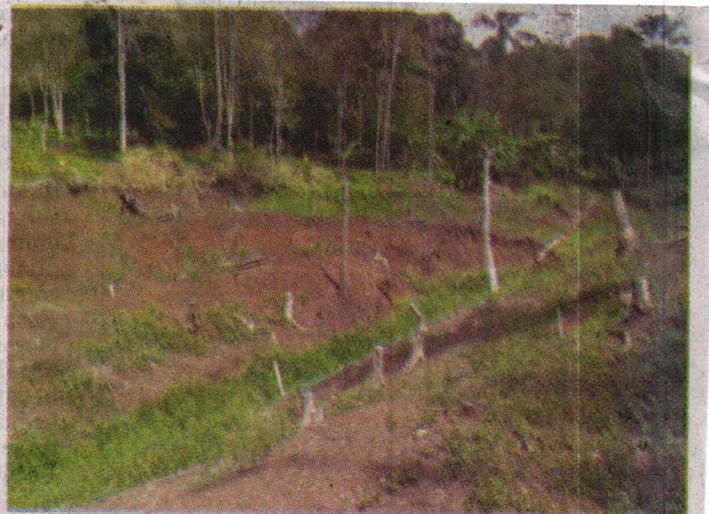
dan pengumuman dilarang menggali. "Beberapa pemilik juga telah kita panggil untuk menghadap dan diinterogasi serta diberikan pembinaan," bebarnya. Terkait penutupan proyek galian C, Wayan Sarba kembali menegaskan agar segala bentuk usaha apapun di Tabanan harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang ada.

Sementara itu, Kepala Kan-

tor Lingkungan Hidup Tabanan, A.A. Ngurah Raka Iswara, saat dikonfirmasi membenarkan bahwa pihaknya telah mengeluarkan kajian yang sebagian besar membuktikan bahwa proyek galian tersebut berdampak negatif. Menurutnya apa yang telah dilakukan satpol PP merupakan penegakan aturan berdasarkan kajian dan dikuatkan oleh instruksi pimpinan Kepala Daerah. (san)

Edisi : Minggu, 21 Juni 2015

Hal : 2



BPM/olo

GUNDUL - *Salah satu kawasan hutan di Jembrana yang gundul saat perabasan massal.*

Hutan Ikut Dikapling

KAWASAN hutan Bali Barat ibarat sudah tak perawan lagi. Pembabatan pohon dan perambahan acap terjadi tanpa memikirkan dampak di hilir. Dari data yang dihimpun, luas kawasan hutan Bali Barat sebanyak 66.000 hektar (Jembrana dan Tabanan), sekitar 22.000 hektar atau 30 persen merupakan lahan kritis. Sebagian besar lahan kritis itu berada di Jembrana.

Selain hutan lindung yang dikelola UPT Bali Barat, di ujung barat Bali ini juga terdapat hutan konservasi di bawah perlindungan Taman Nasional Bali Barat seluas 19 ribu hektar.

Hutan Bali Barat penyumbang paling dominan untuk

daratan hijau di Bali. Dari total luas hutan di Bali 130 ribu hektar, sejatinya belum memenuhi 30 persen luasan hijau. Namun sayangnya, kepedulian terhadap hutan tidak setara dengan fungsi hutan itu.

Kawasan hutan lindung yang semestinya tidak boleh dijamah, kini berubah menjadi kebun-kebun masyarakat. Bukan tanah pertanian saja yang dikapling, hutan sebagai penyangga kehidupan pun ikut dikapling untuk keperluan kebun.

Kondisi ini sudah menjadi rahasia umum, bahkan terjadi transaksi jual-beli lahan di hutan lindung.

**Hal. 23
Gundul**

Edisi : Minggu 21 Juni 2015

Hal : 1



Gundul

Dari Hal. 1

Pada tahun 2008 lalu, pemerintah daerah bersama TNI, polisi, dan masyarakat mencoba melakukan gerakan perabasan tanaman produksi di dalam hutan. Hasilnya cukup mencengangkan. Kawasan hutan lindung terlihat asri di pinggir, namun gundul di dalam. Bahkan lebih mirip perkebunan dengan tanaman produksi. Pohon-pohon penyangga ditebang berganti tanaman produksi seperti pisang, durian dan lainnya. Bahkan, ditemui gubuk-gubuk tempat tinggal para *pengawen* yang berjarak belasan kilometer dari batas hutan. Gubuk-gubuk itu untuk tempat tinggal sementara para *pengawen*.

Pola pembabatan hutan juga sudah modern. Dengan terjangkaunya lokasi perambahan oleh sinyal telepon seluler, mereka dengan leluasa kabur setiap ada operasi. Tak jarang, polisi hutan hanya mendapati gelondongan kayu yang sudah ditebang tanpa pelaku. Selain itu ulah oknum warga yang memanfaatkan hutan lindung ataupun hutan produksi untuk mata pencaharian mereka. Seperti dengan mencari kayu-kayu bakar, namun sayangnya dengan menebang batang pohon yang masih muda.

LSM Forkot, I.B. Aryanto, mengatakan aktivitas perambahan hutan memang tidak terlihat nyata tetapi selalu ada. Aksi *pengawenan* juga sudah menjadi rahasia umum, bahkan hingga transaksi jual-beli lahan. "Hutan dikapling, yang merasakan dampak yang di hilir. Jangan heran kalau nanti jadi wisata banjir, karena hutan sudah gundul," terangnya.

Edisi : Minggu, 21 Juni 2015

Hal : 23



Lingkungan Bali Rusak, Dana Reklamasi Tak Jelas

Agama Hindu kaya akan ajaran yang mengamanatkan umatnya untuk selalu menjaga kelestarian lingkungan. Makna Tumpek Wariga atau Tumpek Bubuh yang dirayakan, Sabtu (20/6) kemarin, perlu direvitalisasi di tengah rusaknya alam Bali.

DESAKAN sosial ekonomi menjadi salah satu pemicu masyarakat mengabaikan kelestarian alam. Seperti yang selama ini terjadi di Bangli. Karena tuntutan "perut" masyarakat, kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas galian C di Desa Songan Kintamani menjadi kian tak terkendali. Hal yang sama terjadi di Klungkung.

Sejak puluhan tahun lalu, wilayah Songan yang kaya akan material muntahan Gunung Batur berupa pasir dan bebatuan dan dikeruk hingga bopeng. Parahnya, aktivitas pengerukan tersebut tidak dibarengi dengan gerakan reboisasi dan reklamasi. Oleh para penambang, lubang bekas galian dibiarkan menganga begitu saja.

Menurut Ketua PHDI Bangli Nyoman Sukra, kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi di Bangli merupakan salah satu dampak negatif kemajuan pembangunan. Selain itu, dia juga menyebutkan bahwa kerusakan lingkungan terjadi tidak

terlepas dari masih rendahnya masyarakat dalam memaknai Tumpek Wariga. Pemaknaan masyarakat terhadap Tumpek Wariga masih sebatas wacana. Belum sepenuhnya dilakukan secara riil.

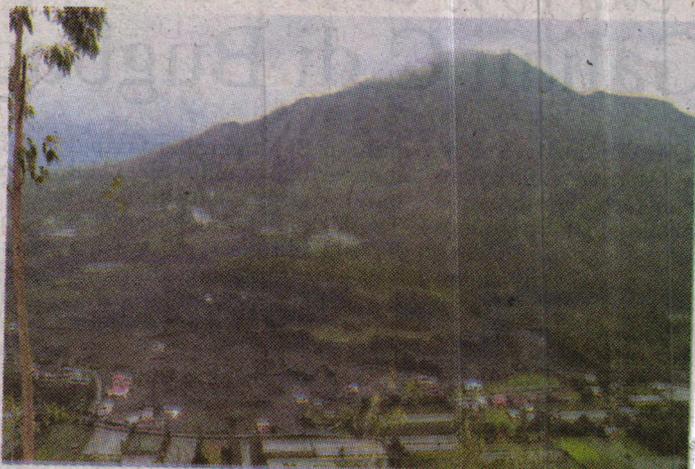
Menurut Sukra, seharusnya Tumpek Wariga yang jatuh setiap 25 hari sebelum hari raya Galungan dapat

dijadikan momentum umat untuk lebih menyadari dan menghargai lingkungan. Selain diwujudkan dengan menggelar ritual/mabanten pengatag, masyarakat diharapkan dapat mengaktualisasikan Tumpek Wariga dengan menanam pohon serta menghentikan tindakan yang merusak lingkungan.

Yang paling parah terjadi di Gunaksa Klungkung dan Karangasem. Lahan eks galian C yang ada di Kabupaten Klungkung belum dapat dimanfaatkan.

Hal. 23

Lubang Menganga



GALIAN C - *Beginilah kerusakan lingkungan akibat galian C di Kintamani.*

BPM/na

Edisi : Minggu, 21 Juni 2015

Hal : 1



Lubang Menganga

Dari Hal. 1

Sayangnya, pascalahan galian C ditutup, dana reboisasi dan reklamasinya tak jelas. Jadilah bermunculan lubang-lubang menganga bekas kerukan yang masih menjadi pemandangan di lahan seluas 300 hektar itu.

Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan dan Administrasi Umum Ketut Suayadnya yang juga Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klungkung mengaku tidak mengetahui keberadaan dana untuk reklamasi yang seharusnya dipungut dari pengusaha galian saat galian C beroperasi.

Hal serupa juga disampaikan Plt. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Klungkung Wayan Wasta yang juga Kabag Perekonomian. Ia mengaku tidak mengetahui terkait adanya anggaran reklamasi. Itu artinya saat galian C beroperasi tidak ada niat dari Pemkab Klungkung untuk membuat pengusaha galian bertanggung

jawab terhadap kerusakan yang disebabkan aktifitasnya. Di sisi lain, pemerintah pun belum melakukan perbaikan terhadap kerusakan alam yang terjadi ini.

Saat ini rencana untuk mendatangkan investor yang mau menggarap lahan galian C tersebut masih terkendala kepemilikan lahan. Mengingat pemilik lahan saat ini sudah tidak bisa memastikan batas lahan pasca kerusakan akibat terjadi pengerukan. Untuk itu, Pemkab Klungkung masih melakukan inventarisasi kepemilikan lahan.

Plt Sekda Klungkung, Ida Bagus Sudarsana didampingi Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Klungkung, I Wayan Tika mengungkapkan, setelah melalui tahapan sosialisasi, pendataan lahan eks galian C sudah memasuki tahapan inventarisasi mengingat masih banyak pemilik lahan yang belum menyertifikasikan kepemilikan lahan. (ina/dwa)